

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah, dan penggunaannya dapat diatur secara bebas oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa sumber pendapatan daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dan Pemerintah Daerah harus benar-benar menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan didaerahnya.

Kota Padang merupakan kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus Ibu Kota dari Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menjadikan Kota Padang sebagai pusat perekonomian sehingga memberikan dampak yang cukup signifikan untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan pertumbuhan Kota Padang saat ini sangat dipastikan bahwa terdapat peningkatan di sektor pajaknya. Dengan meningkatnya pendapatan dari sektor pajak akan membuat pertumbuhan, pembangunan dan Pendapatan asli daerah memberikan arti penting bagi daerah karena nantinya akan dapat dipergunakan untuk menjalankan roda pemerintahan guna menunjang kesejahteraan masyarakatnya (Sari dan Mustanda, 2019). Upaya

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah diluar pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga harus mempunyai upaya untuk meningkatkan beberapa hal yang termasuk dalam lain-lain pendapatan daerah seperti penerimaan sebagai pembayaran atas hasil penjualan aset daerah, jasa giro, sumbangan pihak ketiga, kontribusi badan usaha. Berdasarkan data yang diperoleh mengenai penerimaan dan presentase PAD Kota Padang dari tahun 2020-2024 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berikut ini dapat kita ketahui Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dari tahun 2020-2024 yaitu:

**Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2020-2024 (miliar)**

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>	<b>Presentase PAD*</b>
2020	882,00	80,66 %
2021	889,90	84,61 %
2022	989,90	61,91%
2023	928,65	70,94%
2024	706,84	85,76%

*Sumber :Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) (data diolah,205)*

*Note: \*Presentase PAD diperoleh dari total presentase pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan yang dipisahkan.*

Pada tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi yaitu perubahan naik turun. Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 84,61%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 61,91%, kemudian tahun 2023 mengalami kenaikan kembali sebesar 70,94% dan tahun 2024 PAD Kota Padang mengalami kenaikan yang cukup besar sebesar 85,76% Hal ini menunjukkan bahwa Kota Padang mengalami ketidakseimbangan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020-2024.

Selain PAD, belanja daerah juga memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena sangat berkaitan erat dengan kualitas pelayanan publik yang akan diberikan daerah kepada masyarakatnya. Belanja yang telah dilakukan oleh pemerintah berfungsi sebagai kebijakan ekonomi yang nantinya berdampak pada perekonomian daerah. Hal ini ditunjukkan belanja modal dalam bentuk aset tetap yakni peralatan, pembangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik. Kecil penyerapan anggaran untuk belanja modal dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja dan kualitas pemerintah daerah (Ekasuryana, 2019). Di bawah ini merupakan tabel belanja modal Kota Padang pada tahun 2020-2024.

**Tabel 1.2 Belanja Modal Kota Padang Tahun 2020-2024 (miliar)**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Presentase Belanja Modal*</b>
2020	527,01	57,83 %
2021	473,09	62,97 %
2022	554,99	70,81%
2023	400,48	99,80%
2024	243,96	99,64%

*Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik(BPS)(data diolah,2025)*

*Note : \* Presentase Belanja Modal diperoleh dari presentase belanja tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.*

Berdasarkan tabel diatas, belanja modal Kota Padang mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 57,83%, namun pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan sebesar 62,97% dan 70,81% dan di tahun 2023 belanja modal kembali mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 99,80% dan pada tahun 2024 sebesar 99,64%.

Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal Kota Padang mengalami fluktuasi yaitu mengalami perubahan naik turun penurunan belanja modal yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 99,80% dan 99,64%.

Kinerja merupakan pencapaian/hasil atas apa yang direncanakan, apabila kinerja dilakukan sesuai dengan apa direncanakan maka kinerja tersebut terlaksana dengan baik dengan penggunaan anggaran kuantitas dan kualitas yang terukur. Tujuan dari pengukuran tersebut untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dituntut mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan tersebut. Kinerja keuangan merupakan ukuran pencapaian dalam aspek keuangan termasuk pendapatan dan belanja daerah, maka kinerja keuangan dapat tercermin dari kenaikan pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah (Haryato, 2019). Berikut ini merupakan kriteria efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah

**Tabel 1.3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan**

<b>Keterangan</b>	<b>Rasio efisiensi (%)</b>
Tidak Efisien	$X > 100\%$
Efisien Berimbang	$X = 100\%$
Efisiensi	$X < 100\%$

Sumber: Susuilowati, dkk., 2018

$$\text{Rasio Kinerja Keuangan} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Belanja Daerah</b>	<b>Realisasi Pendapatan Daerah</b>	<b>Kinerja Keuangan (%)</b>
2020	2.139,91	2.094,87	102
2021	2.211,84	2.099,86	105
2022	2.786,63	2.181,23	127
2023c	2.578,20	2.239,82	115
2024	2.560,29	2.047,41	125
<b>Rata-rata</b>			<b>114,8 %</b>

*Sumber: dan Badan Pusat Statistik (BPS) (data diolah,2025)*

*Note : \*presentase kinerja keuangan diperoleh dari belanja daerah dibagi dengan pendapatan daerah lalu dikasli dengan 100%.*

Pada tabel 1.4 kinerja keuangan pemerintah daerah pada tahun 2020-2024 memiliki rata-rata 114,8%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Padang belum menyandang kriteria efisien karena kinerja keuangan besar dari 100% atau memiliki kriteria tidak efisien.

Menurut hasil penelitian terdahulu Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan daerah yaitu Sari P. & Mustanda K. (2019) menemukan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Antari & Sendana (2018), Ekasuryana (2018), dan Haryanto & Lathifa (2019). Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Puri & Darmayanti (2019) menemukan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan M. Yasin dan Kasino (2018).

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1 Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024?
- 2 Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024?
- 3 Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024?

## **1.3 Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini adalah:

- 1 Untuk Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang tahun 2020-2024.
- 2 Untuk Menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang tahun 2020-2024
- 3 Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang tahun 2020-2024.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan pedoman dalam pengendalian sistem intern pemerintah daerah atau terkait dalam APBD dan mengenai langkah-langkah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang pada tahun-tahun berikutnya.

#### **2. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu informasi secara transparan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang.

#### **3. Bagi Penulis**

Penelitian ini guna untuk menambah informasi, manfaat dalam memperluas wawasan dan memperdalam mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal serta Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

## **1.5 Batasan Masalah**

“Penelitian ini akan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pada pemerintahan daerah kota padang tahun 2020-2024.”



